

## STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM KONSERVASI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MODEL DESA BINAAN DAN KEMITRAAN KONSERVASI DI CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP

*(The Development Strategy of the Community Empowerment Based Conservation Program in the with Fostered Village Models and Conservation Partnerships in the Cycloop Mountains Nature Reserve)*

CHANDRA I. LUMBAN GAOL<sup>1,2✉</sup>, JANVITER MANALU<sup>2</sup>, BASA T. RUMAHORBO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Jl. Raya Abepura – Kotaraja, Kota Jayapura, 99511

<sup>2</sup>Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Jayapura

✉Penulis Korespondensi: Email [chandralg60@gmail.com](mailto:chandralg60@gmail.com)

Diterima: 17 Nov 2022 | Disetujui: 23 Des 2022

**Abstrak.** Program konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan Model Desa Binaan (MDB) dan Kemitraan Konservasi (KK) di Cagar Alam Pegunungan Cycloop (CAPC) yang belum berjalan baik mengharuskan adanya pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat, mengukur partisipasi masyarakat, mendeskripsikan dan menilai implementasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan arahan strategi pengembangannya dengan MDB dan KK di CAPC. Penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan konservasi yang merupakan MDB dan KK di CAPC menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di CAPC berada dalam kategori baik; 2) partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di CAPC dengan MDB dan KK berada pada tahap consultation (konsultasi); 3) implementasi program pemberdayaan masyarakat di kawasan CAPC secara umum dinilai cukup baik dan berhasil; 4) faktor-faktor yang mendukung implementasi pemberdayaan masyarakat di kawasan CAPC terdiri dari kekuatan dan peluang; 5) faktor-faktor yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat di kawasan CAPC terdiri dari kelemahan dan ancaman; 6) arahan strategi pemberdayaan masyarakat di CAPC adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM pendamping sehingga pendamping mampu membangun kemitraan dan jejaring usaha yang lebih baik serta mampu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

**Kata Kunci:** Persepsi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, strategi, SWOT, CAPC

**Abstract.** *The community empowerment-based conservation program with the Fostered Village Model and the Conservation Partnership in the Cycloop Mountains Nature Reserve (CAPC) which has not been running well requires the development of a more effective strategy in its implementation. This study aims to analyze community perceptions, measure community participation, describe and assess implementation, identify supporting and inhibiting factors and formulate the direction of its development strategy using the Assisted Village Model and Conservation Partnership at CAPC. This research was conducted around the conservation area which is the Model Village Assistance and Conservation Partnership at CAPC using a qualitative approach with descriptive analysis and SWOT*

*analysis. The results of the study show that 1) community perceptions of community empowerment programs in the guided village model and conservation partnerships in CAPC are in the good category; 2) community participation in community empowerment programs in CAPC with the model of assisted villages and conservation partnerships is at the consultation stage; 3) the implementation of community empowerment programs in the CAPC area is generally considered quite good and successful; 4) the factors that support the implementation of community empowerment in the CAPC area consist of strengths and opportunities; 5) factors that hinder the implementation of community empowerment in the Reserve area CAPC consists of weaknesses and threats; 6) the direction of the community empowerment strategy in the CAPC is to increase the capacity of companion human resources so that assistants are able to build better partnerships and business networks and are able to improve coordination with related agencies.*

**Keywords:** Perception, participation, community empowerment, strategy, SWOT, CAPC

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dalam kawasan konservasi merupakan salah satu inovasi pengelolaan kawasan yang berk-eadilan dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengem-bangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatankekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Kegiatan pember-dayaan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana masyarakat dapat membantu melestarikan hutan, namun tidak melalaikan apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan. Wiratno dkk. (2004), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluasluasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu dalam menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop secara geografis terletak pada posisi 140°22' - 145°43'BT dan 2°25' - 2 °33'LS. Kawasan konservasi ini berbentuk memanjang dan membentang dari Tanjung Tanah Merah Depapre hingga ke arah timur Teluk Numbay. Kawasan ini melintasi dua wilayah administratif

pemerintahan yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang juga merupakan ibukota Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.840 hektar, maka luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop adalah 31.479,89 hektar.

Cagar Alam Pegunungan Cycloop merupakan miniatur perwakilan tipe ekosistem pantai utara Papua (Arobaya dan Pattiselanno 2022). Berdasarkan klasifikasi *Global 2000 Ecoregion*, Cagar Alam Pegunungan Cycloop terdiri dari beberapa tipe ekoregion antara lain; *Northern New Guinea Mountain Forest* dan pada bagian lembah di bagian barat dari kota Sentani terus membujur ke arah Teluk Tanah Merah masuk dalam kelompok *Northern New Guinea Lowland Rain & Freshwater Swamp Forest*. Berdasarkan tipe ekosistem utama di Papua, Kartikasari *et al.* (2012) menyebut terdapat 12 tipe lingkungan utama di Pulau Papua. Dimana di Pegunungan Cycloop terdapat tujuh lingkungan utama, yaitu: hutan mangrove, rawa, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan bawah, hutan hujan pegunungan atas, semak dan savana. Untuk

hutan, menurut Ratchliffe (1984), kawasan Pegunungan Cycloop didominasi oleh hutan hujan primer yang bervariasi berdasarkan ketinggian dalam struktur komposisinya. Yaitu: hutan dataran rendah (di bawah 100 mdpl), hutan dataran tinggi (200 mdpl), hutan daerah perbukitan (600 mdpl) dan hutan pegunungan (di atas 800 mdpl). Sedangkan Hope and Tulip (1994), mengemukakan bahwa ada 4 tipe ekosistem utama disamping beberapa tipe ekosistem kecil lainnya, yaitu: *Upper Montane*, *Montane*, *Forest* dan *Grassland*.

Balai Besar KSDA Papua (2019), mengemukakan kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop mempunyai potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi. Selain keunikan ekosistemnya, Cagar Alam Pegunungan Cycloop menjadi habitat bagi sekitar 178 jenis flora dari tingkat lumut hingga pohon. Diperkirakan sebanyak 107 jenis mamalia juga hidup di kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop dengan jenis yang cukup dominan ditemui antara lain babi hutan, kelelawar, dll. Untuk jenis burung ditemukan sekitar 279 jenis dengan 3 spesies kunci yang dilindungi, yaitu Cenderawasih (*Paradisea minor*), Mambruk dan Kasuari. Selain itu Cagar Alam Pegunungan Cycloop juga merupakan rumah bagi sekitar 31 jenis katak, 65 jenis reptil dan 271 jenis kupu-kupu.

Model Desa Binaan (Desbin) dan Kemitraan Konservasi (Kemkon) merupakan *pilot project* pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi model tersebut dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Kawasan Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Desbin dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembangunan berbasis konservasi dengan tujuan utama meningkatkan keberdayaan masyarakat yang masih tertinggal atau miskin di sekitar kawasan konservasi menuju kemandirian dan mutu kehidupan yang lebih baik, serta hidup harmonis dengan

kawasan konservasi dan alam sekitarnya (Direktorat KSDAE 2015). Berdasarkan keberhasilan program desa binaan di sekitar kawasan konservasi, Taufik, I. (2019 Agustus 8), Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menerima apresiasi dalam kategori Desa Binaan Konservasi dalam bentuk KTH Sumber yang telah berhasil membudidayakan jamur tiram di Desa Samaenre, Mallawa, Maros dalam mengolah bahan mentah produksi sendiri menjadi produk makanan yang siap dikonsumsi olahan kripik jamur dan abon jamur.

Kemitraan konservasi adalah pemberian akses pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan salah satu terobosan di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pada satu sisi kawasan konservasi menjadi salah satu cara penyelesaian konflik tenurial, di sisi lain menjadi jalan bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk memanfaatkan sumber daya kawasan. Secara hukum, Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA disusun untuk memayungi kegiatan-kegiatan di atas. Berdasarkan keberhasilan program kemitraan konservasi di sekitar kawasan konservasi, Djati, W. (2018 Oktober 3), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) bersama *Conservation International* (CI) Indonesia dan *Daikin Industries* di Resort Nagrak melakukan pemulihan ekosistem seluas 300 hektar yang bertujuan mengembalikan ekosistem pada kondisi asli, atau mendekati aslinya bersama dukungan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari upaya konservasi dan menjadi pelaku konservasi. Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop merupakan satu kesatuan ekosistem dengan kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan lain (APL). Areal Penggunaan Lain di sekitar Cagar Alam Pegunungan Cycloop berkembang

pesat menjadi pemukiman dan bahkan perkotaan. Pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung juga didapati telah banyak aktifitas pembangunan dan perladangan. Kondisi tersebut tentu berpotensi mengganggu upaya perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan. Selain berpotensi mengubah ekosistem, aktivitas dan pembangunan yang dilakukan juga berpotensi mendukung berkurang atau bahkan kepunahan spesies-spesies penting di kawasan ini, yang keberadaannya sangat penting dimasa mendatang.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua (BBKSDA) sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di salah satu kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop (CAPC) tahun 2021 telah membentuk Model Desa Binaan di 7 (tujuh) desa yaitu Desa Tablasupa, Desa Maribu, Desa Doyo Baru, Desa Dosai, Desa Yewena, Kelurahan Angkasa dan Kelurahan Waena, sedangkan Model Kemitraan Konservasi di 4 (empat) desa yaitu Desa Sabron Sari, Desa Sereh, Desa Necheibe dan Kelurahan Angkasa yang mewakili Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Sarmi.

Program pemberdayaan masyarakat dalam Balai Besar KSDA Papua, melalui di Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi, terdiri dari program identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok, penyusunan rencana kelompok, fasilitasi kesepakatan konservasi, penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*), program pengembangan usaha ekonomi produktif, pendampingan masyarakat dan monitoring serta evaluasi kelompok. Program ini bertujuan untuk meminimalisir aktivitas masyarakat yang merusak kawasan yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati di CAPC sehingga dapat

mempertahankan keutuhan ekosistem serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Balai Besar KSDA Papua dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Namun pada kenyataannya, program pemberdayaan masyarakat tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan dimana hasil yang diperoleh kurang optimal. Hal lain yang menjadi kelemahan implementasi program pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua yaitu sulitnya menjaga kontinuitas/keberlanjutan program, mengakibatkan program yang dilakukan tidak berkesinambungan, padahal keberlanjutan program merupakan inti dari terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat (Hamid dkk. 2003 dalam Kuncoro 2004). Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi maka perlu dilakukan kajian terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan di Balai Besar KSDA Papua serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi pemberdayaan masyarakat selanjutnya di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat, mengukur partisipasi masyarakat, mendeskripsikan dan menilai implementasi pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat dan merumuskan arahan strategi pemberdayaan masyarakat di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua dalam mendukung pembangunan Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura. Lokasi di Kota Jayapura yaitu Kelurahan Angkasa dan Kelurahan Waena, sedangkan di lokasi di Kabupaten Jayapura yaitu Kampung Sereh, Kampung Doyo Baru, Kampung Sabron Sari, Kampung Dosai, Kampung Maribu, Kampung Tablasupa, Kampung Yewena dan Kampung Necheibe. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juni 2022 sampai Desember 2022 (Gambar 1).

### Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diupayakan untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci dengan memberikan gambaran secara komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya sehingga nantinya dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Model Desa Konservasi di kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Jenis atau strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop pada Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan beberapa narasumber atau informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang Balai Besar KSDA Papua dan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data-data yang dimaksud adalah wawancara, diskusi, penyebaran kuisioner, observasi dan studi literatur atau dokumen.

### Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil dari studi dokumen dan wawancara mendalam. Setelah dipelajari dan ditelaah lebih lanjut, kemudian dilakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada pada konteks yang tepat. Secara terperinci teknik analisa data berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) menganalisis persepsi masyarakat dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan mengukur rumusan persepsi masyarakat adalah metode Skala Likert. 2) mengukur partisipasi masyarakat menggunakan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*). 3) mendeskripsikan dan menilai implementasi program adalah metode skala likert dengan hasil modifikasi berdasarkan pedoman kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 4) menganalisis faktor yang mendukung dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap kondisi aspek-aspek serta dilakukan pula wawancara. 5) menganalisis faktor yang menghambat dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap kondisi aspek-aspek serta dilakukan pula wawancara. 6) merumuskan arah strategi pemberdayaan masyarakat analisis SWOT

dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal.

**HASIL PENELITIAN**

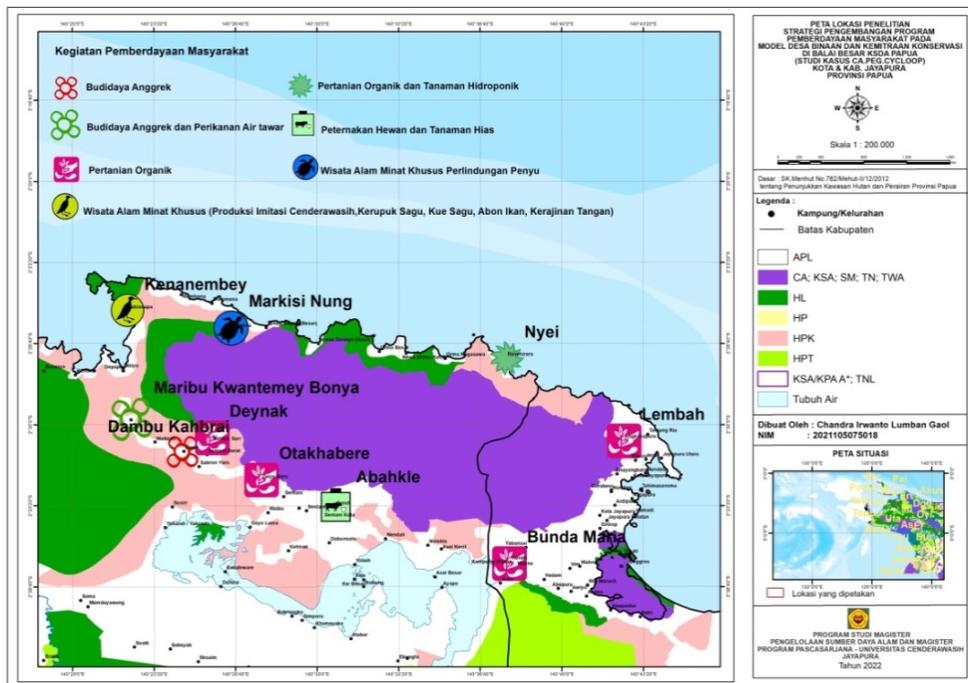
**Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop berada dalam kategori baik dengan skor rata-rata 74,28. Hal ini berarti, responden memiliki persepsi yang baik terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi saat ini dan merupakan modal utama yang baik untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Tabel 1).

Berkaitan dengan pemahaman tentang program konservasi berbasis masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi, seluruh responden menyatakan setuju dan

sangat setuju bahwa saat ini kondisi pengelolaan jauh lebih baik dengan adanya program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi dan hadirnya resort-resort di 5 (lima) dewan adat suku di wilayah adat yang mengelilingi CA Pegunungan Cycloop dibandingkan pada saat dikelola oleh pengelola sebelumnya (belum dengan sistem resort).

Terhadap persepsi masyarakat terhadap komunikasi fasilitator program baik secara pendekatan perorangan (dialog langsung) dan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini masih menunjukkan eksistensi petugas lapangan selalu hadir di tingkat tapak bersama masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop

Tabel 1. Rekapitulasi skor dan kriteria persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop

No.	Persepsi	Skor
1.	Persepsi pemahaman masyarakat tentang program konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi	78,02
2.	Persepsi masyarakat tentang ketersediaan sumberdaya pendukung program ( <i>resources</i> ) dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop	76,73
3.	Persepsi masyarakat tentang pengaruh program konservasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop	67,70
4.	Persepsi masyarakat tentang kesesuaian program konservasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop	75
5.	Persepsi masyarakat tentang tindak lanjut program konservasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop	70,18
6.	Persepsi masyarakat tentang komunikasi fasilitator program baik secara pendekatan perorangan (dialog langsung) dan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop	78,05
Skor Rata-rata		74,28
Kriteria		Baik

Sumber: Data primer diolah (2022)

### Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey dan dianalisis menggunakan tangga Arnstein (1969), partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi berada pada tahap *Consultation* (konsultasi), kata “konsultasi” digunakan untuk sebuah dialog, yaitu suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah

diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan (Tabel 2). Kondisi ini termasuk dalam konteks partisipasi yang tergolong dalam derajat semu (*tokenism*). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pemberdayaan masyarakat terlibat dalam suatu program pengelolaan kelompok desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, dimana sesungguhnya keterlibatan masyarakat sudah melakukan kegiatan secara sukarela, sudah mengetahui manfaatnya, dan masyarakat dapat membuat usulan mengenai hal tersebut, walaupun tidak ada jaminan untuk diterima dalam program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi.

Tabel 2. Rekapitulasi skor tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop

No.	Indikator	Skor
1.	Adanya Informasi Pelaksanaan Identifikasi Potensi Desa dan Pemetaan Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat	120
2.	Adanya Undangan tentang Program Pemberdayaan Masyarakat	107
3.	Adanya Sosialisasi Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat	104
4.	Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dapat Memberi Usulan Program	97
5.	Pembahasan atas Usulan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	105
6.	Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dapat Memberi Masukan Secara Langsung	110
7.	Tingkat Kepercayaan BBKSDA Papua Kepada Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ikut Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat	119
8.	Ketersediaan Sarana Bagi Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	96
Skor Total		858
Kriteria		<i>Consultation - Tokenism</i>

Sumber: Data primer diolah (2022)

### Deskripsi dan Penilaian Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penilaian kriteria dan indikator terhadap 9 (sembilan) tahapan pemberdayaan masyarakat dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi yang dilaksanakan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop berdasarkan Pedoman Kriteria dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Ditjen PHKA 2007, diketahui bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop secara umum dinilai cukup baik dan dengan nilai 2,03 dianggap berhasil, namun pada tiap tahapan masih ditemukan beberapa permasalahan. Adapun tahapan yang dinilai kurang baik implementasinya yaitu tahapan membangun/mengembangkan kelembagaan tingkat desa, pelatihan PRA dan pelaksanaan PRA (Tabel 3).

Berdasarkan hasil penilaian kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat, implementasi program pemberdayaan masyarakat

dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop dinilai sudah cukup baik dan dengan nilai 2,03 implementasinya dianggap berhasil. Namun pada tiap tahapannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan deskripsi implementasi program pemberdayaan masyarakat di CAPC, maka diketahui permasalahan yang ditemukan pada setiap tahapan secara umum terkait Belum aktifnya stakeholder dan masyarakat dalam mengikuti pertemuan, serta masih kurangnya kesepahaman antar stakeholder terkait aturan-aturan/kebijakan pengelolaan kawasan CAPC sehingga masih terjadinya peningkatan kasus gangguan terhadap kawasan, Belum dibangunnya kelompok atas inisiatif masyarakat sendiri, aturan kelompok yang dibuat belum dipahami dan ditaati oleh seluruh anggota dan belum ada sanksi tegas atas hal tersebut sehingga rentan menimbulkan pertentangan di dalam kelompok, Jumlah tenaga pendamping penyuluh kehutanan yang belum sesuai dengan kebutuhan dan pendamping yang ada pun belum memahami kondisi wilayah

kerjanya serta belum memiliki hubungan kerja dengan berbagai stakeholder. Kurangnya sumber daya manusia pendamping berdampak pada intensitas kunjungan ke kelompok menjadi kurang dan pendamping tidak ada setiap dibutuhkan sehingga tidak dapat mendampingi penyelesaian permasalahan kelompok secara intensif, Belum adanya Rencana Usaha Keluarga (RUK), Tidak terdapatnya urutan prioritas kegiatan pembangunan desa, tidak dilaksanakannya lokakarya tingkat desa sehingga menyebabkan tidak adanya Rencana pembinaan Lima Tahun (RPL) yang disetujui, disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan musrembangdes/musrembangkec/musrembangkab, dimana masih terdapatnya pelaksanaan pelatihan atau pengembangan keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan

masyarakat serta masih kurang terlihatnya hasil kerja masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, Belum terjaminnya ketersediaan modal usaha dan sarana produksi, belum terjaminnya pemasaran hasil produksi, belum adanya usaha pelestarian potensi komoditas bahan baku, serta kurangnya dukungan teknologi tepat guna dan kerja sama stakeholder dalam pengembangan pendanaan, Belum aktifnya masyarakat dalam mencari mitra serta belum terdapatnya jejaring kerja pemberdayaan masyarakat di CAPC, Realisasi pelaksanaan mo-nev yang belum sesuai dengan perencanaannya, masih belum lancarnya pembinaan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan masih terdapatnya permasalahan masyarakat yang belum terpecahkan.

Tabel 3. Hasil penilaian kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat di CAPC

No.	Tahapan	Penilaian BBKSDA Papua	Penilaian
1.	Membangun kesepahaman dengan stakeholder	2,05	Cukup Baik
2.	Membangun/ mengembangkan kelembagaan	2,03	Cukup Baik
3.	Menyiapkan fasilitator/ pendamping	2,31	Baik
4.	Pelatihan PRA	1,78	Kurang Baik
5.	Pelaksanaan PRA	1,76	Kurang Baik
6.	Peningkatan kapasitas masyarakat	2,17	Baik
7.	Pengembangan usaha ekonomi produktif	2,05	Cukup Baik
8.	Membangun kemitraan dan jejaring usaha	2,08	Cukup Baik
9.	Monitoring dan evaluasi	2,04	Cukup Baik
Rata-Rata		2,03	
<b>Penilaian terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di CAPC</b>			<b>Berhasil</b>

Sumber: Data primer diolah (2022)

Tabel 4. Matrik IFAS

No.	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x
<b>Kekuatan (Strengts)</b>				
1.	Adanya Visi dan Misi Organisasi Ditjen KSDAE dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di CAPC	0,103	4	0,411

2.	Adanya penetapan Desa Target Penelitian sebagai Model Desa Binaan (Desbin) dan Kemitraan Konservasi (Kemkon)	0,107	4	0,428
3.	Implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	0,086	3	0,257
4.	Dukungan gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balai Besar KSDA Papua serta tunjangan bagi pejabat fungsional (Penyuluh, PEH dan POLHUT)	0,081	3	0,244
5.	Dukungan pejabat dan staf Balai Besar KSDA Papua dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di CAPC	0,077	2	0,154
	Sub Total	0,454		1,495
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>				
1.	Sumberdaya manusia sebagai fasilitator pendamping yang masih terbatas dan peran fasilitator yang tidak optimal	0,111	4	0,445
2.	Kualitas SDM pendamping yang kurang dan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat yang tidak seragam	0,103	4	0,411
3.	Kemitraan dan jejaring usaha yang belum berkembang	0,088	3	0,263
4.	Belum adanya Masterplan Pemberdayaan Masyarakat Balai Besar KSDA Papua di kawasan CAPC	0,073	3	0,218
5.	Koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal	0,090	3	0,270
6.	Sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas	0,081	2	0,163
	Sub Total	0,546		1,771
	Total	1		

Sumber: Data primer diolah (2022)

Tabel 5. Matrik EFAS

No.	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>				
1.	Dukungan Kebijakan Nasional terkait Pemberdayaan Masyarakat	0,082	4	0,328
2.	Potensi sumber daya alam	0,095	4	0,381
3.	Masyarakat mendukung dan mau untuk terlibat	0,097	4	0,388
4.	Peluang pasar dan permintaan yang tinggi	0,080	3	0,241
5.	Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan instansi terkait lainnya	0,084	4	0,336

6.	Adanya pedoman-pedoman pendukung terkait pengelolaan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	0,073	3	0,218
	Sub Total	0,511		1,892
<b>Ancaman (Threats)</b>				
1.	Sulitnya aksesibilitas menuju kawasan	0,084	3	0,252
2.	Kelembagaan kelompok masyarakat belum optimal	0,093	4	0,373
3.	Rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat	0,086	4	0,343
4.	Keterbatasan penguasaan modal dan teknologi	0,088	3	0,263
5.	Pengaruh elit dalam proses pemberdayaan masyarakat	0,067	2	0,134
6.	Cuaca yang tidak mendukung	0,071	2	0,142
	Sub Total	0,489		1,507
	Total	1		

Sumber: Data primer diolah (2022)

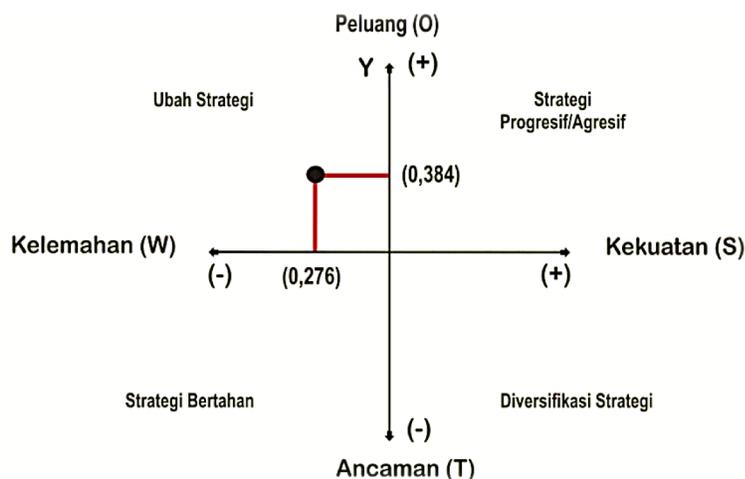
Tabel 6. Matrik SWOT strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop

	Kekuatan/ <i>Strengths</i> (S)	Kelemahan/ <i>Weaknesses</i> (W)
IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Visi dan Misi Organisasi Ditjen KSDAE dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di CAPC</li> <li>Adanya penetapan Desa Target Penelitian sebagai Model Desa Binaan (Desbin) dan Kemitraan Konservasi (Kemkon)</li> <li>Implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>Dukungan gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balai Besar KSDA Papua serta tunjangan bagi pejabat fungsional (Penyuluh, PEH dan POLHUT)</li> <li>Dukungan pejabat dan staf Balai Besar KSDA Papua dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di CAPC</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumberdaya manusia sebagai fasilitator pendamping yang masih terbatas dan peran fasilitator yang tidak optimal</li> <li>Kualitas SDM pendamping yang kurang dan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat yang tidak seragam</li> <li>Kemitraan dan jejaring usaha yang belum berkembang</li> <li>Belum adanya Masterplan Pemberdayaan Masyarakat Balai Besar KSDA Papua di kawasan CAPC</li> <li>Koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal</li> <li>Sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan masyarakat yang masih</li> </ol>
EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary)		

Peluang/ <i>Opportunities</i> (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<p>1. Dukungan Kebijakan Nasional terkait Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>2. Potensi sumber daya alam</p> <p>3. Masyarakat mendukung mau untuk terlibat</p> <p>4. Peluang pasar dan permintaan yang tinggi</p> <p>5. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan desa dan Instansi terkait</p> <p>6. Adanya pedoman-pedoman pendukung terkait pengelolaan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi</p>	<p>1. Mengoptimalkan program Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi dengan memanfaatkan dukungan kebijakan nasional yang ada dan program pemberdayaan dari desa dan instansi terkait.</p> <p>2. Menggalakkan program pengembangan ekonomi produktif Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi dengan memanfaatkan sekitar CA Pegunungan Cycloop serta peluang pasar yang ada</p> <p>3. Mengoptimalkan kinerja staf dalam memanfaatkan dan menerapkan pedoman-pedoman pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan implementasi program pemberdayaan masyarakat di CAPC.</p> <p>4. Mengembangkan program pemberdayaan dengan memanfaatkan dukungan masyarakat.</p> <p>5. Meningkatkan peran dan komitmen staf untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan desa dan instansi terkait lainnya sesuai regulasi yang ada.</p>	<p>1. Meningkatkan kuantitas SDM pendamping dengan memanfaatkan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM pendamping dengan memanfaatkan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat dan melalui kerjasama dengan instansi terkait.</p> <p>3. Membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan pelaksana program pemberdayaan di desa dan instansi terkait lainnya.</p> <p>4. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan masyarakat di kawasan dengan memanfaatkan dana bantuan dari program pemberdayaan nasional, desa dan instansi lainnya.</p> <p>5. Membuat master plan pemberdayaan masyarakat di CAPC dengan memanfaatkan pedoman yang ada.</p> <p>6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan kegiatan pemberdayaan yang ada di Balai Besar KSDA Papua dan yang ada di desa dan instansi terkait lainnya.</p>
<p>Ancaman/<i>Threats</i> (T)</p> <p>1. Sulitnya aksesibilitas menuju kawasan</p> <p>2. Kelembagaan kelompok masyarakat belum optimal</p> <p>3. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat</p> <p>4. Keterbatasan penguasaan modal dan teknologi</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>1. Meningkatkan peran dan komitmen staf Balai Besar KSDA Papua untuk mendampingi kelembagaan kelompok yang belum optimal</p> <p>2. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal dan pelatihan teknologi tepat guna</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>1. Mengatur kembali jadwal pendampingan agar tidak berbenturan dengan kondisi cuaca.</p> <p>2. Meningkatkan kinerja SDM yang ada dalam mendampingi kelompok masyarakat.</p> <p>3. Memanfaatkan kemitraan dan jejaring usaha yang sudah ada</p>

5. Pengaruh elit dalam proses pemberdayaan masyarakat	untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemahaman masyarakat	untuk meningkatkan aliran modal usaha dan kerjasama
6. Cuaca yang tidak mendukung	3. Menyusun perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menyesuaikan pola kondisi cuaca.	terkait pelatihan teknologi tepat guna
	4. Meningkatkan kinerja staf untuk membangun pemberdayaan dengan tidak hanya melibatkan informasi dari elit desa saja.	4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk aksesibilitas ke kawasan.
		5. Meningkatkan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemahaman masyarakat.

Sumber: Data primer diolah (2022)



Gambar 2. Posisi strategi pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua pada Kawasan CAP

**Strategi Pengembangan Program**

**Pemberdayaan masyarakat di cagar Alam Pegunungan Cycloop**

Berdasarkan hasil analisis IFAS pada Tabel 4, terlihat bahwa faktor kekuatan (*strenghts*) mempunyai nilai sebesar 1,495 dan kelemahan (*weakness*) mempunyai nilai sebesar 1,771. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat di kawasan CA Pegunungan Cycloop memiliki kekuatan 45,4% lebih kecil dibandingkan dengan kelemahan sebesar 54,6%. Berdasarkan hasil perhitungan dari faktor lingkungan

internal, yaitu faktor kekuatan dikurangi dengan faktor kelemahan diperoleh nilai X sebagai sumbu horizontal =  $1,495 - 1,771 = -0,276$ . Dengan demikian, nilai sumbu X dalam diagram SWOT adalah -0,276. Berdasarkan hasil analisis EFAS pada Tabel 5 terlihat bahwa faktor peluang (*opportunities*) mempunyai nilai sebesar 1,892, dan ancaman (*threats*) mempunyai nilai sebesar 1,507. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa peluang yang dimiliki sebesar 51,1% lebih besar dibandingkan dengan ancaman sebesar 48,9%.

Adapun nilai pada sumbu Y sebagai sumbu vertikal adalah  $1,892 - 1,507 = 0,384$ . Dengan demikian, nilai sumbu Y dalam diagram SWOT adalah 0,384. Hasil perhitungan matriks IFAS dan matriks EFAS menghasilkan nilai sumbu X sebesar -0,276 dan nilai sumbu Y sebesar 0,384, sehingga dapat digambarkan dalam diagram SWOT pada Gambar 2. Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategi pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua pada kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop, pada pemetaan analisis lingkungan strategis (lingkungan internal dan eksternal) berada pada kuadran ketiga (III) atau pada posisi ubah strategi atau pada posisi strategi WO. Hal ini memberikan indikasi bahwa (0,384) (-) (0,276) strategi progresif atau agresif diversifikasi strategi ubah strategi. Strategi bertahan kelemahan (W) Y (+) peluang (O) (-) ancaman (T) (+) kekuatan (S) peluang strategi pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua pada kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop berada dalam keadaan lemah, namun sangat berpeluang.

Posisi strategi pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam pegunungan Cycloop berdasarkan diagram SWOT berada pada kuadran III dengan strategi W-O, yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi, artinya dalam implementasi pemberdayaan masyarakat di CA Pegunungan Cycloop disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus untuk memperbaiki kinerja. Walaupun posisi strategi berada pada strategi W-O, namun perlu dirumuskan strategi yang lebih komprehensif dengan rumusan strategi S-O, S-T, dan W-T, sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Menurut Saputro dan Santoso (2016), Implementasi merupakan wujud dari program yang telah dirumuskan. Implementasi adalah proses

dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Hal tersebut diartikan, bahwa apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran, dan prosedur (Windhyastiti dan Khourouh 2019).

### Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa alternatif program dan kegiatan dalam rangka arahan perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Strategi W-O dijadikan sebagai strategi prioritas sebagaimana posisinya pada kuadran III. alternatif program kegiatan dari strategi W-O ini adalah sebagai berikut: a) meningkatkan kuantitas SDM pendamping memanfaatkan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat, b) meningkatkan kualitas SDM pendamping dengan memanfaatkan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat dan melalui kerjasama dengan instansi terkait, c) membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan pelaksana program pemberdayaan di desa dan instansi terkait lainnya, d) memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi dengan memanfaatkan dana bantuan dari program pemberdayaan nasional, desa dan instansi lainnya, e) membuat rencana pemberdayaan masyarakat di CAPC dengan memanfaatkan pedoman yang ada, f) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan kegiatan pemberdayaan yang ada di Balai Besar KSDA Papua dan yang ada di desa dan instansi terkait lainnya.

Merumuskan arah strategi program pemberdayaan masyarakat selanjutnya dalam mendukung pembangunan Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi di Balai Besar KSDA Papua, maka dilakukan analisis SWOT. Penggunaan analisis SWOT dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal pihak pengelola Balai Besar KSDA Papua sehingga diketahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Selain menganalisis faktor internal juga dilakukan analisis faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mengembangkan Model Desa Binaan dan Model Kemitraan Konservasi di Balai Besar KSDA Papua. Analisis SWOT ini mengacu pada Sjafrizal (2009). Analisis SWOT pada dasarnya merupakan identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan dan selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya.

Sebelum merumuskan tujuan, data-data yang telah dikumpulkan dikelompokkan ke dalam data internal dan data eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis faktor internal dengan menggunakan matriks faktor strategi internal (*internal strategic factors analysis summary/IFAS*), dan analisis faktor eksternal menggunakan matriks faktor strategi eksternal (*external strategic factors analysis summary/EFAS*) meliputi: **Kekuatan** yang terdiri dari: 1) Adanya Visi dan Misi Organisasi Ditjen KSDAE dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di CAPC; 2) Adanya penetapan Desa Target Penelitian sebagai Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi; 3) Implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); 4) Dukungan gaji dan tunjangan kinerja pegawai Balai Besar KSDA Papua serta tunjangan bagi pejabat fungsional (Penyuluh,

PEH dan POLHUT), 5) Dukungan pejabat dan staf Balai Besar KSDA Papua dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di CAPC. **Kelemahan** yang terdiri dari: 1) Sumberdaya manusia sebagai fasilitator pendamping yang masih terbatas dan peran fasilitator yang tidak optimal; 2) Kualitas SDM pendamping yang kurang dan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat yang tidak seragam; 3) Kemitraan dan jejaring usaha yang belum berkembang; 4) Belum adanya Masterplan Pemberdayaan Masyarakat Balai Besar KSDA Papua di kawasan CAPC; 5) Koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal; 6) Sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas.

**Peluang** yang terdiri dari: 1) Dukungan Kebijakan Nasional terkait pemberdayaan masyarakat; 2) Potensi sumber daya alam; 3) Masyarakat mendukung mau untuk terlibat; 4) Peluang pasar dan permintaan yang tinggi; 5) Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan desa dan Instansi terkait; 6) Adanya pedoman-pedoman pendukung terkait pengelolaan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. **Ancaman** yang terdiri dari: 1) Sulitnya aksesibilitas menuju kawasan; 2) Kelembagaan kelompok masyarakat belum optimal; 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat; 4) Keterbatasan penguasaan modal dan teknologi; 5) Pengaruh elit dalam proses pemberdayaan masyarakat; 6) Cuaca yang tidak mendukung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 1) Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop berada dalam kategori baik dengan skor rata-rata 74,28. Hal

ini berarti, responden memiliki persepsi yang baik terhadap program pemberdayaan masyarakat pada model desa binaan dan kemitraan konservasi saat ini dan merupakan modal utama yang baik untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop, 2) Partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Balai Besar KSDA Papua dengan model desa binaan dan kemitraan konservasi berada pada tahap *consultation* (konsultasi).

Kondisi ini termasuk dalam konteks partisipasi yang tergolong dalam derajat semu (*tokenism*). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pemberdayaan masyarakat terlibat dalam suatu program pengelolaan kelompok desa binaan dan kemitraan konservasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, dimana sesungguhnya keterlibatan masyarakat sudah melakukan kegiatan secara sukarela, sudah mengetahui manfaatnya, dan masyarakat dapat membuat usulan mengenai hal tersebut, walaupun tidak ada jaminan untuk diterima dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut, 3) Implementasi program pemberdayaan masyarakat di kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang dilakukan melalui 9 (sembilan) tahapan keseluruhannya sudah dilaksanakan dan secara umum dinilai Cukup Baik dan Berhasil, 4) Faktor-faktor yang mendukung implementasi pemberdayaan masyarakat di kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop meliputi Kekuatan yang terdiri dari: Adanya Visi dan Misi Organisasi Ditjen KSDAE yang mendukung, Adanya penetapan Desa Target Penelitian sebagai Model Desa Binaan dan Kemitraan Konservasi, Implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dukungan gaji dan tunjangan kinerja pegawai dan Dukungan pejabat dan staf Balai Besar KSDA Papua; serta Peluang yang terdiri dari: Dukungan Kebijakan Nasional, Potensi sumber daya alam, Masyarakat

mendukung dan mau untuk terlibat, Peluang pasar dan permintaan yang tinggi, Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan instansi terkait lainnya dan Adanya pedoman-pedoman pendukung, 5) Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop meliputi Kelemahan yang terdiri dari: SDM pendamping yang terbatas dan peran pendamping yang belum optimal, Kualitas SDM pendamping kurang dan pemahaman yang tidak seragam, Kemitraan dan jejaring usaha yang belum berkembang, Belum adanya Masterplan Pemberdayaan Masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal, dan Sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas; serta Ancaman yang terdiri dari: Sulitnya aksesibilitas menuju kawasan, Kelembagaan kelompok masyarakat belum optimal, Rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, Keterbatasan penguasaan modal dan teknologi, Pengaruh elit dalam proses pemberdayaan masyarakat dan Cuaca ekstrem. 6) Arah strategi pemberdayaan masyarakat di Cagar Alam Pegunungan Cycloop adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM pendamping sehingga pendamping mampu membangun kemitraan dan jejaring usaha yang lebih baik serta mampu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arobaya AYS, Pattiselanno AF. 2022. Kepadatan populasi, frekuensi relative dan kemampuan *Spathoglottis papuana* hidup pada berbagai ekosistem di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Papua. Jurnal Kehutanan Papuaasia, 8(1): 13-24. DOI: <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss1.286>.
- Direktorat KSDAE. 2015. Petunjuk teknis penyusunan rencana pembinaan desa binaan

- di daerah penyangga kawasan konservasi. Jakarta.
- Kartikasari SN, Marshall JA, Beehler BM. 2012. Seri Ekologi Indonesia, Jilid VI Ekologi Papua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International Jakarta.
- Wiratno dkk. 2018. Sepuluh cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia. Direktorat jenderal KSDAE. Jakarta.
- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. 2019. Rencana pengelolaan jangka panjang Cagar Alam Pegunungan Cycloop Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua Periode Tahun 2020-2029. Jayapura. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Dinilai pada tanggal 4 Oktober 2019 (tidak dipublikasikan).
- Kuncoro M. 2004. Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi perencanaan, strategi dan peluang. Erlangga. Jakarta.
- Arnstein S. 1969. A ladder of citizen participation, JAIP Vol. 35, No.4, pp.216-224. Diunduh dari [https://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1969\\_Arnstein\\_participationladderAJP.pdf](https://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/1969_Arnstein_participationladderAJP.pdf).
- Windhyastiti I, Hidayatullah S, Khourouh U. 2109. How to increase city investment attraction. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(09): 1070-1073.
- Hope G, Tulip J. 1994. A long vegetation history from lowland Irian Jaya, Indonesia Dalam Buletin Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 109 (1994) 385-398.
- Ratcliffe B. 1984. Cagar Alam Pegunungan Cyclop/Dafonsoro Management Plan-WWF Irian Jaya. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2021/04/30/mengkaji-etnoekologi-orang-tepra-di-batas-utara-cagar-alam-pegunungan-cycloop-papua/>.
- Sjafrizal. 2009. Teknik praktis penyusunan rencana pembangunan daerah. Baduose Media, Padang.